

Editorial:

The Remasculinization of Global Politics in the Contemporary Era

Editorial: Remaskulinisasi Politik Global di Era Kontemporer

Dias P.S. Mahayasa

Dinamika politik internasional dalam satu dekade terakhir memperlihatkan arah perubahan yang signifikan. Kebijakan luar negeri banyak negara bergerak menuju pola yang menekankan kekuatan, ketegasan, dan kemampuan menunjukkan dominasi di level internasional. Fenomena ini dapat dibaca sebagai remaskulinisasi kebijakan luar negeri, kembalinya nilai maskulin sebagai dasar orientasi kebijakan luar negeri. Nilai ini muncul dalam bentuk rasionalitas yang mengesampingkan emosi, pendekatan keamanan yang menekankan kontrol, persepsi ancaman yang membenarkan tindakan keras, dan memposisikan pemimpin sebagai pelindung.

Untuk memahami fenomena ini, perlu ditelusuri kembali fondasi epistemologis hubungan internasional (HI) yang dibangun dari tradisi pemikiran patriarkal. Hubungan Internasional sejak awal dikembangkan melalui kerangka filsafat politik Barat yang menggambarkan subjek politik ideal sebagai individu otonom yang kuat, rasional, dan tidak tergantung pada orang lain. Individu tersebut digambarkan sebagai laki-laki. Ketika konsep tersebut diperluas menjadi konsep negara, negara pun diasumsikan memiliki sifat maskulin (Tickner, 1992). Penstudi feminisme juga memandang bahwa konsep anarki yang menjadi dasar realisme juga memuat bias gender. Anarki digambarkan sebagai kondisi tanpa otoritas tertinggi yang memaksa aktor bersaing secara agresif. Waltz (1979) membayangkan dunia internasional sebagai ruang keras yang menuntut akumulasi kekuatan. Tickner (1995) menunjukkan bahwa cara pandang tersebut merupakan proyeksi dari dunia sosial laki-laki yang mengesampingkan identitas feminine, sehingga dianggap tidak menggambarkan keseluruhan realitas politik internasional.

Ketika anarki dipahami sebagai ruang negosiasi terhadap ancaman, negara pun dipaksa mengadopsi nilai maskulin seperti *self-help* (Waltz, 1979) dan pendekatan militerisme. Connell (1995) memperdalam pemahaman ini melalui konsep maskulinitas hegemonik. Maskulinitas hegemonik hadir sebagai struktur relasi sosial yang menentukan perilaku ideal laki-laki dalam masyarakat, yang menempatkan nilai seperti keberanian menghadapi risiko, dan kemampuan mengendalikan situasi di puncak hierarki sosial. Ketika negara terikat pada struktur ini, negara dipaksa menjadi aktor yang kuat dan tegas. Negara harus mampu menunjukkan otoritasnya melalui tindakan, sehingga arah kebijakan luar negeri pun dibentuk oleh logika tersebut. Nilai tersebut menempatkan gaya kepemimpinan agresif sebagai strategi yang dianggap tepat untuk mewartakan ideologi maskulin (Hooper, 2001).

Dalam perspektif ini, pemimpin negara akan mengadopsi peran pelindung, yang merupakan peran maskulin. Negara merasa bertanggung jawab menjaga keselamatan rakyat dari ancaman dan dalam logika tersebut, penggunaan kekerasan dianggap sebagai hal yang sah dilakukan. Cara pandang ini menguatkan remaskulinisasi karena negara menghubungkan tindakan keras dengan kebaikan moral (Sjoberg, 2013). Di sisi yang sama, Shepherd (2008) memperlihatkan bagaimana wacana keamanan membentuk identitas negara. Bahasa bernada ancaman yang digunakan untuk mengarahkan perhatian publik pada ancaman eksternal adalah bentuk legitimasi untuk bertindak keras. Wacana tersebut memproduksi imajinasi bahwa dunia dipenuhi musuh, dan ketika wacana ini menguasai ruang publik, negara seringkali dipaksa merespon isu internasional menggunakan kekerasan.

Dampaknya, diplomasi yang membutuhkan pendekatan yang lebih halus kemudian kehilangan rasionalitas, karena dianggap lambat dan tidak sesuai dengan urgensi dalam logika ancaman. Kritik Enloe (2014) menyoroti bahwa hubungan internasional dibangun dari aspek-aspek yang sering diabaikan dan tidak terlihat. Pekerjaan perempuan dalam konteks diplomasi dan militer sering tidak dianggap penting dalam konteks logika ancaman, namun kerja mereka menopang struktur negara. Ketika dimensi ini tidak diakui, negara semakin terikat pada struktur maskulin yang memusatkan perhatian pada kekuatan fisik dan militer dalam merespon isu internasional.

Seluruh pembacaan teoretis ini memberikan pemahaman bahwa HI dibangun dari cara pandang maskulin sejak awal. Ketika dunia memasuki fase multi krisis, cara pandang tersebut muncul kembali dengan intensitas lebih

tinggi. Terjadinya krisis global mendorong remaskulinisasi. Pandemi COVID-19, misalnya, memperlihatkan bagaimana negara memusatkan kekuatan di tangan pemimpin untuk memberikan instruksi tegas dan mendorong negara menjadi pelindung rakyatnya, alih-alih melindungi umat manusia dari ancaman global. Wenham (2021) menunjukkan bahwa pandemi memperkuat ekspektasi publik terhadap pemimpin yang mampu mengendalikan situasi melalui kebijakan asertif, dan retorika yang mempertontonkan ketegasan dipandang sebagai bukti kompetensi dari pemimpin politik di tengah krisis.

Negara-negara di berbagai kawasan menaikkan anggaran pertahanan dan memfokuskan pada strategi penguatan militer. Peningkatan anggaran pertahanan di berbagai kawasan merupakan bukti bahwa negara memusatkan perhatiannya pada kemampuan untuk melakukan koersi. Hal ini menandakan ketika anggaran dialihkan ke pertahanan, nilai maskulin yang hidup dalam institusi militer mendapatkan ruang lebih besar (Kronsell, 2012). Dimensi migrasi global juga tidak lepas dari gejala remaskulinisasi. Negara memperketat perbatasan dan menganggap migran sebagai ancaman terhadap stabilitas. Perbatasan diperlakukan sebagai tubuh negara yang harus dilindungi, sehingga memperlihatkan bagaimana negara memproyeksikan maskulinitasnya melalui kontrol terhadap mobilitas (Mountz, 2020). Ketika negara memperkuat pengawasan, negara menghidupkan nilai-nilai maskulin yang memandang kontrol sebagai bentuk keamanan.

Geopolitik global pun bergerak ke arah yang sama. Rivalitas antara Amerika Serikat dan memaksa negara-negara di dunia yang tidak ingin tertinggal untuk memilih dan mempertegas posisi. Persaingan teknologi, ekonomi, dan militer antara kedua kekuatan besar tersebut memperkuat dinamika geopolitik yang berorientasi pada akumulasi kekuatan dan sumber daya. Turunannya, isu-isu yang dianggap tidak mendukung negara mencapai puncak dominasi cenderung dipinggirkan.

Respon terhadap perubahan iklim adalah salah satunya. Negara menganggap dampak perubahan iklim sebagai ancaman terhadap stabilitas dan sebagai penghalang negara mencapai puncak dominasi. Akhirnya, respon yang diberikan sering memakai logika keamanan. Negara mengembangkan strategi militeristik seperti pengawasan satelit dan proteksi wilayah. Pendekatan ini memperkuat logika bahwa krisis iklim adalah masalah ancaman, bukan masalah relasi sosial atau kebutuhan kolaborasi global (MacGregor, 2017). Strategi

keamanan ini mempersempit ruang bagi pendekatan ekologis yang lebih inklusif di luar logika ancaman dan akumulasi sumber daya.

Sejalan dengan krisis iklim yang menjadi isu sekunder, remaskulinisasi bergerak juga melalui peran media. Media sering menempatkan pemimpin tegas dalam posisi yang lebih populer. Kepemimpinan yang mengandalkan perintah langsung dan penekanan otoritas sering diberi akses lebih besar terhadap ruang publik. Media memperkuat citra maskulin pemimpin dan memengaruhi persepsi publik bahwa pemimpin seperti itu lebih kompeten (Ben Ghiat, 2020). Fenomena ini memperlihatkan bahwa remaskulinisasi tidak hanya bekerja melalui kebijakan luar negeri, tetapi juga melalui proses produksi diskursus politik. Ketika publik terbiasa dengan gaya kepemimpinan tegas, negara menganggap pola tersebut sebagai bentuk legitimasi. Negara menampilkan ketegasan, media menyoroti ketegasan itu, publik memberi dukungan, dan negara merasa perlu menunjukkan ketegasan yang semakin kuat. Siklus itu menciptakan logika politik yang menilai kewibawaan hanya melalui performativitas kekuatan.

Dalam konteks ini, negara tidak hanya memproduksi remaskulinisasi melalui tindakan, tetapi juga melalui cara negara memaknai keberhasilan diplomasi. Ketika media dan publik memberi penghargaan berlebihan pada performativitas ketegasan, negara menganggap gaya tersebut sebagai standar baru kepemimpinan yang efektif. Asumsi ini bermasalah karena menyederhanakan diplomasi menjadi demonstrasi otoritas, sedangkan banyak isu global tidak dapat diselesaikan dengan logika kebijakan yang agresif dan mengandalkan koersi. Diplomasi juga membutuhkan ruang untuk membangun kepercayaan, konsensus, dan menciptakan ruang dialog yang tidak bisa hadir dalam struktur politik yang menempatkan ketegasan sebagai kualitas dominan. Di titik ini remaskulinisasi memperlihatkan batasnya, karena ia hanya memberi keuntungan jangka pendek pada citra tetapi mengorbankan fondasi jangka panjang bagi stabilitas global.

Pada akhirnya remaskulinisasi kebijakan luar negeri berpotensi mempersempit ruang bagi diplomasi yang menonjolkan moralitas dan sisi manusiawi. Diplomasi membutuhkan kemampuan empati, mengolah kompleksitas, dan mengelola ketegangan secara berkelanjutan. Remaskulinisasi membuat diplomasi tampak sebagai tanda negara yang lemah, efeknya negara lalu memilih tindakan yang memberikan efek singkat pada citra hegemonik. Padahal diplomasi dibangun atas fleksibilitas dan ketekunan membangun relasi.

Ketika diplomasi dikesampingkan, dunia kehilangan instrumen penting untuk menyelesaikan konflik secara damai, dan berpotensi terjebak pada logika keamanan yang meminimalisasi kooperasi antar negara.

Pada edisi 8.2. kali ini JUSS (Jurnal Sosial Soedirman), memuat 5 artikel akademik, dan bahasan mengenai maskulinitas dan kebijakan luar negeri terdapat pada artikel kedua di edisi kali ini. Tulisan dari Agastya Wardhana dan Vanyadhita Iglan berjudul *Masculine Foreign Policy: Geopolitical Codes Interpretation of Donald Trump 2nd Term*, membahas kebijakan luar negeri Trump yang secara konsisten menjalankan dan mereproduksi logika maskulinitas hegemonik dengan memprioritaskan dominasi, loyalitas yang bersifat transaksional, kekuatan koersif, dan unilateralisme. Dalam konfigurasi ini, praktik kenegaraan mengalami remaskulinisasi, perlindungan diperlakukan sebagai bentuk kontrol, dan diplomasi ditempatkan di bawah kekuatan unilateral.

Artikel kedua dari Arif Setyanto yang berjudul *Environmental Degradation and Climate Change: Can Globalization be the Remedy of the Problems It Has Caused?*. Artikel ini membahas mengenai paradoks globalisasi yang makin mempercepat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, meskipun sering dipromosikan sebagai sarana untuk mendorong teknologi hijau dan tata kelola lingkungan global. Kajian terhadap panel surya, kendaraan listrik, UNFCCC, dan Paris Agreement menunjukkan bahwa globalisasi saat ini masih gagal mengatasi maupun memitigasi masalah lingkungan dan iklim.

Artikel ketiga dari Ellena Permata Hanidha berjudul *Pink Triangles and Raised Fists: Framing of AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) and Black Lives Matter (BLM) through Graphic Art Activism*. Tulisan ini membahas mengenai perbandingan framing seni grafis ACT UP pada 1980–90an dan Black Lives Matter pada 2020 dengan menggunakan teori framing Benford dan Snow untuk melihat pola yang bertahan dan berubah dalam aktivisme seni grafis. Temuannya menunjukkan bahwa kedua gerakan memakai simbol sejarah penindasan, menantang narasi dominan, memobilisasi kemarahan dan solidaritas, serta menawarkan solusi yang ditujukan kepada negara dan masyarakat, sehingga menegaskan peran berkelanjutan seni grafis sebagai alat transformasi sosial.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Santa Iin Olivia Siagian, Citra widiyaningrum, Radiel Raafi Fudhala, berjudul *The United States' CHIPS Act Strategy to Reduce Dependence on Taiwan Semiconductor Manufacturing Company*. Artikel ini

membahas mengenai strategi Amerika Serikat melalui CHIPS and Science Act 2022 untuk mengurangi ketergantungan pada TSMC, dengan menggunakan teori neomerkantilisme dan konsep proteksionisme strategis untuk menjelaskan kepentingan politik dan keamanan ekonomi di balik intervensi negara dalam industri semikonduktor. Temuannya menunjukkan bahwa CHIPS Act berfungsi sebagai kebijakan ekonomi sekaligus strategi geopolitik untuk memperkuat kemandirian teknologi dan mengurangi risiko rantai pasok global, sehingga menjadi manifestasi nyata proteksionisme strategis dalam rivalitas teknologi global.

Artikel terakhir ditulis oleh Isabel Nepa Ripasha, Fathir Khairunnisa, Alita Nurdiana Putri, berjudul *Strategi Ketahanan Ekonomi Taiwan di Tengah Persaingan Teknologi AS–Tiongkok 2018–2025*. Tulisan ini mendiskusikan bahwa melalui New Southbound Policy, relokasi industri, dan Industrial Policy 2.0, Taiwan mampu menjaga stabilitas makroekonomi, meningkatkan efisiensi pasar, serta memperkuat tata kelola di tengah rivalitas teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun masih menghadapi ketergantungan pada pasar Tiongkok dan risiko geopolitik di Selat Taiwan, strategi tersebut efektif membangun ketahanan ekonomi yang lebih fleksibel, inovatif, dan berkelanjutan.

Edisi 8.2 JUSS menghadirkan lima artikel yang menawarkan analisis mendalam dan relevan bagi pengembangan kajian sosial dan politik. Redaksi menaruh harapan besar agar kontribusi ini dapat memicu percakapan akademik yang lebih dinamis dan kritis. Kami berkomitmen untuk terus menyediakan ruang berkualitas bagi para peneliti untuk mempublikasikan karya terbaik mereka.

Hormat saya,

Dias P.S. Mahayasa

Editor

Daftar Pustaka

- Ben-Ghiat, R. (2020). *Strongmen: From Mussolini to the Present*. New York: W. W. Norton & Company.
- Connell, R. W. (1995). *Masculinities*. Berkeley: University of California Press.
- Enloe, C. (2014). *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics* (2nd ed.). Berkeley: University of California Press.
- Hooper, C. (2001). *Manly States: Masculinities, International Relations, and Gender Politics*. New York: Columbia University Press.
- Kronsell, A. (2012). *Gender, Sex, and the Postnational Defense: Militarism and Peacekeeping*. Oxford: Oxford University Press.
- MacGregor, S. (2017). *Gender and Climate Change: An Introduction*. London: Routledge.
- Mountz, A. (2020). *The Death of Asylum: Hidden Geographies of the Enforcement Archipelago*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Shepherd, L. J. (2008). *Gender, Violence and Security: Discourse as Practice*. London: Zed Books.
- Sjoberg, L. (2013). *Gendering Global Conflict: Toward a Feminist Theory of War*. New York: Columbia University Press.
- Tickner, J. A. (1992). *Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security*. New York: Columbia University Press.
- Tickner, J. A. (1995). Re-visioning security. In K. Booth & S. Smith (Eds.), *International Relations Theory Today* (pp. 175–197). Cambridge: Polity Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Wenham, C. (2021). *Feminist Global Health Security*. Oxford: Oxford University Press.